

IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN MUTASI SISWA SD DAN SMP DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF STUDENTS MUTATION PROGRAM FOR SD AND SMP IN ONE DOOR INTEGRATED SERVICE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AND SPORTS EDUCATION, YOGYAKARTA CITY

Oleh: Rimawati Septyaningsih Kebijakan Pendidikan
Rimawatisepryaningsih.2017@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam PTSP di Disdikpora Kota Yogyakarta. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi program layanan mutasi siswa di Disdikpora Kota Yogyakarta: a) Standar layanan mutasi adalah nilai siswa dan ketersediaan formasi kelas di sekolah yang dituju serta sasarannya adalah masyarakat yang ingin mengajukan surat permohonan mutasi siswa. b) Sumber daya yang dimiliki berupa 4 orang petugas pelaksana serta fasilitas yang memadai. c) Karakteristik organisasinya cekatan dan mampu bekerja sama dengan baik. d) Hubungan antar organisasi baik, terbukti dengan adanya komunikasi dan koordinasi saat pelaksanaan layanan. e) Kondisi lingkungan saling mendukung. f) Disposisi tercermin dari kecakapan agen pelaksana. (2) Faktor pendukungnya adalah fasilitas lengkap, SDM memadai, serta proses administrasi yang mudah dan jelas. Faktor penghambatnya a) Petugas yang masih *double job* sehingga tidak bisa fokus ke layanan mutasi siswa. b) Pelaksanaan layanan mutasi yang belum bisa dilaksanakan secara *full online*. c) Alur pemrosesan berkas yang masih cukup memakan waktu karena sistem penomoran yang manual. d) Kurang *updatenya* Kepala Bidang terhadap berkas yang masuk ke sistemnya.

Kata kunci: Implementasi, Mutasi Siswa, Disdikpora Kota Yogyakarta

Abstract

This study aims to describe the implementation as well as the supporting and inhibiting factors of the transfer service program for elementary and junior high school students in PTSP at Disdikpora Yogyakarta City. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The results obtained are: (1) Implementation of the student transfer service program at the Disdikpora Yogyakarta City: a) The standard of mutation service is the value of students and the availability of class formations at the target school and the target is the community who wants to apply for a student transfer application. b) Resources in the form of 4 implementing officers from the Junior High School Development Division and Elementary School Development staff and adequate facilities. c) The characteristics of the organization are nimble and able to work well together. d) Relationships between organizations run with communication and coordination during service delivery. e) Environmental conditions are mutually supportive. f) Disposition is reflected in the capability of the executing agent. (2) The supporting factors are complete facilities, adequate human resources, and easy and clear administrative processes. The inhibiting factors a) Officers who are still double jobs so they cannot focus on student transfer services. b) Implementation of mutation services that cannot be carried out fully online. c) The file processing flow is still quite time consuming because of the manual numbering system. d) Not updating the field header for the files that enter the system.

Keywords: Implementation, Student Mutation, Disdikpora Yogyakarta City

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia untuk mengupayakan perubahan dalam hidupnya. Upaya ini dilakukan secara sadar dan terencana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Melalui pendidikan, manusia akan berkesempatan untuk mengenal, menyadari, mengalami, dan memahami realita yang ada pada diri dan sekitarnya.

Manusia sebagai individu yang merdeka tentu memiliki cita-cita hidup yang ingin dicapai. Begitu pula dengan negara sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang merdeka tentu juga memiliki cita-cita. Dikutip dari Pembukaan UUD 1945 alenia keempat salah satu tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila, secara tersirat juga memuat visi dan misi bangsa yaitu terwujudnya Indonesia emas 2045 sebagai tujuan jangka panjang 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Upaya mewujudkan cita-cita bangsa dapat dimulai dengan pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk. Salah satu indikator kualitas penduduk yang baik dapat dilihat dari segi pendidikannya. Berdasarkan berita yang dikutip dari jawapos.com (2019), ranking yang dikeluarkan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA)

tahun 2018 nilai indikator kemampuan membaca, matematika, dan sains Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah nasional yang berada di angka 8,34. Daerah tersebut yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Selain indeks pendidikan yang masih rendah, masih adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru juga menjadi bukti bahwa pendidikan Indonesia belum sepenuhnya merdeka serta membutuhkan perhatian lebih. Kasus yang terjadi di Mojokerto beberapa waktu lalu yang termuat dalam inilajmojokerto.com (2019), dua orang siswa SD mengalami kekerasan dari gurunya sehingga menimbulkan trauma bagi anak. Pihak orang tua kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pihak sekolah, namun orang tua mengambil keputusan untuk memindahkan anak mereka ke sekolah yang lain.

Kasus mutasi atau perpindahan peserta didik selain karena kekerasan juga disebabkan karena perpindahan domisili orang tua siswa, pindah tugas bagi aparat

negara, serta pindah kewarganegaraan bagi warga negara asing. Akan tetapi, alur pelayanan perpindahan peserta didik yang dinilai masih berbelit-belit dan tidak transparan menjadi penghambat bagi orang tua yang akan mengajukan surat permohonan mutasi. Bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahui berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan permohonan mutasi kepada pemerintah dinas pendidikan setempat. Pihak sekolah yang seharusnya menjadi jembatan penghubung antara orang tua siswa dengan pemerintah dinas pendidikan juga masih minim informasi. Sekolah juga kurang proaktif dalam mencari informasi terkait dengan alur pelayanan mutasi.

Hasil penelitian pada Praktik Kependidikan (PK) di Disdikpora Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat sekolah yang belum mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk memperoleh surat rekomendasi mutasi. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa belum terjadi sinkronisasi antara orang tua, sekolah, dan dinas pendidikan setempat tentang alur pelayanan mutasi siswa. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh dinas pendidikan setempat perlu diperbaiki agar diperoleh kesesuaian pandangan administrasi tentang layanan mutasi siswa.

Fenomena tersebut menjadikan Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kota Yogyakarta sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik di bidang pendidikan melakukan inovasi pelayanan serta merespon peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dengan membentuk program pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Sebelum adanya PTSP, pelayanan mutasi siswa di Disdikpora Kota Yogyakarta dilakukan di masing-masing bidang. Hal tersebut dirasa kurang efektif dan efisien serta dapat mengganggu kondusifitas lingkungan kerja di bidang pembinaan SD dan SMP apabila terdapat banyak tamu yang masuk. Selain itu, ruang bidang pembinaan SD dan SMP yang berada di lantai tiga menjadikannya tidak mudah diakses dan ramah terhadap tamu yang datang. Adanya pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan informasi umum serta memberikan layanan prima dalam hal persuratan dan non persuratan yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta secara cepat, efektif, efisien, dan memuaskan bagi masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan saat mengikuti Praktik Kependidikan (PK) di

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa layanan yang paling sering diajukan oleh pemohon adalah layanan mutasi siswa SD dan SMP. Pelaksanaan layanan mutasi siswa SD dan SMP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) BAB IV Pasal 33-35 yang mengatur perpindahan peserta didik, dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/556 Tahun 2020 tentang Mekanisme Mutasi Peserta Didik pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Orang tua siswa memilih untuk memindahkan anak mereka karena alasan perpindahan domisili. Hingga pertengahan tahun 2020, tercatat sebanyak 45 siswa mutasi masuk ke Kota Yogyakarta, 200 siswa mutasi ke luar Kota Yogyakarta, dan 18 siswa mutasi Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Layanan Mutasi Siswa SD dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Hayam Wuruk No.11, Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55212. Penelitian ini dilakukan Februari – April 2021. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan karena data yang diperoleh sudah valid dan kredibel.

Target/Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembinaan SD/SMP, Kepala Seksi Bidang Pembinaan SD/SMP, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, petugas teknis layanan mutasi siswa SD dan SMP, serta pihak pemohon berkas mutasi siswa SD/SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti sudah mengetahui narasumber yang akan dituju. Objek penelitiannya yaitu implementasi program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan prosedur wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait implementasi program layanan mutasi

siswa SD dan SMP dalam PTSP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan mendukung data yang diperoleh pada saat proses penelitian implementasi program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam PTSP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dokumentasi tersebut berupa foto, video, pamflet, papan pengumuman, maupun data-data pendukung lainnya yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapatkan melalui wawancara terstruktur yang didasarkan pada teori implementasi Van Horn dan Van Meter (Rohman, 2012). Teori Van Horn dan Van Meter memiliki enam indikator dasar, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, dan disposisi implementator.

Studi dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data pendukung. Dokumentasi tersebut meliputi profil Disdikpora Kota Yogyakarta, Visi dan Misi, SOP pelaksanaan pelayanan mutasi, data pemohon rekomendasi mutasi siswa tahun 2020, kegiatan layanan mutasi siswa, dan

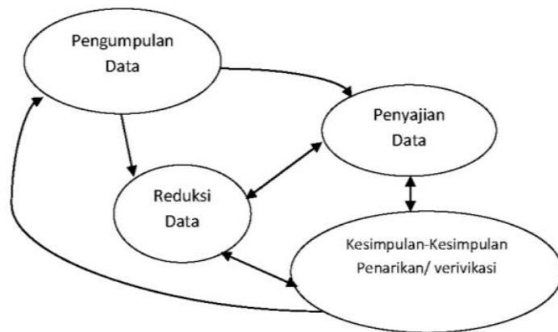
sarana prasarana penunjang pelaksanaan layanan mutasi siswa.

Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (Sugiyono, 2020: 134) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara *continue* hingga data tersebut jenuh. Tahapan model analisis interaktif menurut Miles and Huberman sesuai pada penjelasan dan gambar berikut.

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara seorang peneliti untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian sehingga peneliti memperoleh data dari berbagai sumber yang bervariasi.
2. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan data yang diperoleh, serta mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2020: 135).
3. Penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau kausalitas, dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bersifat naratif.
4. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih abstrak kemudian

diteliti untuk menghasilkan sebuah teori atau gambaran baru dari objek tersebut.



Gambar 1. Komponen Analisis Data (Sugiono, 2020: 134)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Layanan Mutasi Siswa SD dan SMP dalam PTSP di Disdikpora Kota Yogyakarta

Hasil penelitian menggunakan teori Van Horn dan Van Meter yang terdiri dari enam aspek menunjukkan data sebagai berikut.

a. Standar dan Sasaran

Standar layanan mutasi siswa di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 serta Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/556. Berkas yang harus dipenuhi meliputi (a) Surat keterangan pindah dari sekolah asal; (b) Surat keterangan pindah dari Dinas setempat; (c) Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Sekolah; (d) Fotokopi rapor siswa; (e) Surat perwalian (Jika tidak mengikuti

orang tua sendiri); (f) Surat keterangan ketersediaan formasi kelas; (g) Fotokopi NISN.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sasaran dari layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam PTSP di Disdikpora Kota Yogyakarta adalah masyarakat yang ingin mengajukan surat rekomendasi atau permohonan mutasi bagi putra-putri mereka yang duduk di bangku Sekolah dasar atau Sekolah Menengah Pertama yang dilakukan di PTSP. Berikut adalah tabel rekap data pemohon mutasi siswa tahun 2020.

Tabel 1. Rekap Data Pemohon Mutasi Siswa Tahun 2020

No.	Mutasi Siswa	SD	SMP
1	Mutasi Masuk Kota	97	90
2	Mutasi Ke Luar Kota	238	50
3	Mutasi Dalam Kota	46	35
4	Mutasi Melanjutkan	14	3

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam PTSP di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah Kepala Dinas sebagai penanggung jawab, Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP yang berwenang untuk menandatangani berkas rekomendasi mutasi siswa, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP yang bertugas melakukan *checking* ulang berkas sebelum diproses ke *e-office*, 4 orang tim pelaksana dari

Bidang Pembinaan SMP, serta pegawai dari Bidang Pembinaan SD. Selain itu, terdapat juga Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelayanan yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sumber daya finansial dalam implementasi program layanan mutasi siswa adalah nol rupiah dalam hal operasionalnya, karena masyarakat tidak dipungut biaya pada saat mengajukan berkas permohonan rekomendasi mutasi siswa.

Sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal layanan mutasi siswa adalah SDM yang unggul serta ramah dan cekatan. Selain itu, karena layanan mutasi dilakukan di PTSP, maka PTSP memiliki fasilitas yang lengkap. Ruangan tersebut mudah diakses oleh masyarakat, bersih, luas, nyaman, ber-AC, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, disediakan juga lembar *check list* persyaratan mutasi untuk memudahkan masyarakat dan petugas pada saat melakukan *checking* berkas.

c. Hubungan Antar Organisasi

Komunikasi yang dilakukan antar agen pelaksana layanan mutasi siswa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Petugas pelaksana akan berkomunikasi langsung dengan kepala seksi apabila terjadi permasalahan pada saat proses layanan

mutasi. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat dijalankan secara langsung melalui petugas pelaksana yang menjadi jembatan antara Disdikpora Kota Yogyakarta dengan masyarakat. Bentuk komunikasi secara tidak langsung juga diberikan melalui *fleet* layanan yang ditampilkan di PTSP serta *website* Disdikpora Kota Yogyakarta yang bisa diakses di

<https://pendidikan.jogjakota.go.id/>.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam implementasi program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam PTSP yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Kota Yogyakarta memiliki wewenang penuh apabila petugas pelaksana sedang melakukan tugasnya di PTSP. Akan tetapi, apabila petugas pelaksana sudah kembali ke bidang masing-masing, maka tanggung jawab dan kewajiban petugas pelaksana kembali kepada kepala bidang masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas batasan dan pembagian tugas menjadi terorganisir.

d. Karakteristik Pelaksana

Petugas pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam implementasi program layanan mutasi siswa memiliki sikap yang baik, perhatian kepada masyarakat, bertindak dengan cekatan untuk mengatasi permasalahan yang ada, memiliki kemampuan yang berkompeten

sesuai dengan tupoksi masing-masing personalia, berpenampilan menarik sesuai dengan kode etik pegawai di lingkungan dinas, bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya, memiliki sifat afirmatif yang dibuktikan dengan kemampuannya dalam bernegosiasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dengan berkasnya, serta memiliki rasa simpati yang tinggi.

e. Kondisi Lingkungan

Van Horn dan Van Meter menyatakan bahwa variabel lingkungan mencakup sumber daya ekonomi yang mendukung implementasi kebijakan, dukungan partisipan atau kelompok masyarakat, serta dukungan elit politik yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Birokrasi yang terlibat juga mendukung penuh pelaksanaan program layanan mutasi siswa dengan rutin melakukan evaluasi bersama agar tidak terjadi disorientasi terhadap peraturan yang telah dibuat. Selain itu, masyarakat sebagai partisipan juga mendukung implementasi program layanan mutasi siswa dalam PTSP.

f. Disposisi Implementator

Edward III (Subarsono, 2015: 90) disposisi adalah karakter atau watak yang dimiliki oleh implementator kebijakan.

Pandangan Van Horn dan Van Meter, variabel disposisi implementator mencakup respon implementator terhadap kebijakan, pemahaman implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdikpora Kota Yogyakarta memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam PTSP. Hal tersebut sesuai dengan visi yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pendidikan. Selain komitmen yang tinggi, Disdikpora Kota Yogyakarta juga memiliki sumber daya pelaksana yang cekatan, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka sesuai dengan tupoksi yang ada. Pengawasan di Disdikpora Kota Yogyakarta juga sudah dilaksanakan dengan optimal melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Layanan mutasi Siswa SD dan SMP dalam PTSP di Disdikpora Kota Yogyakarta

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam PTSP di Disdikpora Kota Yogyakarta yang pertama adalah sumber daya fasilitas yang memadai. Lokasi PTSP yang berada di lantai satu menjadikannya

mudah diakses oleh masyarakat dan menjadikan pegawai dan masyarakat lebih *safety* di masa pandemi seperti sekarang ini.

Kedua, berkaitan dengan sumber daya manusia. Petugas pelaksana layanan mutasi siswa di PTSP memiliki *background* pendidikan yang sesuai sehingga dapat berkomunikasi dan bernegosiasi serta memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat yang datang ke PTSP Disdikpora Kota Yogyakarta.

Ketiga, proses administrasi yang mudah dan jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari SOP pelayanan kepada masyarakat yang sudah disederhanakan sehingga tidak berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Dari yang awalnya surat rekomendasi mutasi akan selesai diproses dalam waktu 5 hari, dengan adanya PTSP maka rekomendasi mutasi akan dikeluarkan dalam waktu 2-3 hari kerja.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang pertama yaitu kurang terorganisirnya pembagian tugas yang dimiliki oleh petugas pelaksana sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan petugas pelaksana dalam melaksanakan tupoksinya pada layanan mutasi siswa. Petugas pelaksanaan layanan mutasi siswa mendapatkan *double job* yaitu di PTSP dan di Bidang masing-masing sehingga tidak bisa fokus ke satu pekerjaan saja.

Kedua, layanan mutasi juga belum bisa dilaksanakan secara *full* daring karena belum siapnya masyarakat dan pemerintah Disdikpora Kota Yogyakarta masih terus melakukan penyempurnaan yang menjadi cerminan dari dukungan nonfisik terhadap implementasi program layanan mutasi siswa.

Ketiga, jika dilihat dari aspek pembagian potensi yang berkaitan dengan koordinasi lembaga, alur proses berkas masih cukup memakan waktu karena sistem penomoran surat rekomendasi yang masih manual, menunggu disposisi berkas dari Kepala Seksi, dan juga Kepala Bidang tidak selalu *up to date* dengan akun *e-officena* sehingga menimbulkan penumpukan berkas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program layanan mutasi siswa SD dan SMP dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta disimpulkan bahwa terdapat dua standar dalam layanan mutasi siswa, yaitu standar nilai dan ketersediaan formasi kelas pada sekolah yang dituju. Layanan mutasi siswa diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan surat rekomendasi mutasi siswa tanpa dipungut biaya. Sumber daya manusia yang dimiliki yaitu empat orang

petugas pelaksana dari Bidang Pembinaan SMP dan Bidang Pembinaan SD yang bertanggung jawab serta mandiri dan cekatan. Fasilitas yang diberikan lengkap, meliputi ruangan yang nyaman, bersih, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Komunikasi antar pelaksana berjalan dengan lancar sesuai dan sesuai pembagian tugas yang diberikan. Publikasi layanan dilakukan melalui *website* dan *fleet* serta *X-Banner* yang terpasang di *lobby* kantor. Iklim kerja yang baik mampu diciptakan di lingkungan Disdikpora Kota Yogyakarta sehingga masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan baik.

Faktor pendukung implementasi program layanan mutasi siswa yaitu fasilitas yang memadai, SDM yang terlibat terdiri dari berbagai *background* pendidikan dan pengalaman sehingga memiliki peran masing-masing dalam pembagian tugas maupun penyelesaian masalah, serta proses administrasi yang mudah dan jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari SOP pelayanan kepada masyarakat yang sudah disederhanakan sehingga tidak berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu (1) petugas yang masih *double job* sehingga tidak bisa fokus ke layanan mutasi siswa, (2) pelaksanaan layanan mutasi yang belum bisa dilaksanakan secara *full online* karena belum siapnya masyarakat sebagai partisipan, (3) alur pemrosesan berkas yang

masih cukup memakan waktu karena sistem penomoran yang manual, dan (4) kurang *updatenya* kepala bidang terhadap berkas yang masuk ke sistemnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang diberikan oleh peneliti yaitu: (1) Disdikpora Kota Yogyakarta perlu membentuk tim khusus PTSP dibawah komando Subbag Umum dan Kepegawaian agar petugas pelaksanaanya tidak memiliki *double job*. (2) Sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media seperti *youtube*, *instagram*, dan *facebook* tentang berkas dan alur layanan mutasi siswa. (3) Adanya sistem penomoran surat yang terintegrasi di lingkup Disdikpora Kota Yogyakarta melalui *e-office*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). <https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/18/1773/rata-rata-lama-sekolah-menurut-provinsi-metode-baru-2010-2019.html> Diakses Pada Jumat, 8 Januari 2021 Pukul 11:54
- Gerintya, Scholastica. (2019). *Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saingpun Lemah*. <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR> Diakses pada Sabtu, 2 Januari 2021 pukul 19:31
- Hasbullah, H. M. (2016). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/556 Tahun 2020 tentang Mekanisme Mutasi Peserta Didik pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) BAB IV Pasal 33-35.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Setiawan, Hilmi. (2019). *Ranking PISA Indonesia Turun, Dipicu Salah Orientasi Pendidikan*. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/12/2019/ranking-pisa-indonesia-turun-dipicu-salah-orientasi-pendidikan/> diakses pada Sabtu, 2 Januari 2021 Pukul 17:03
- Subarsono, AG. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta Cetakan Ketiga.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uyo. (2019). *Alasan Mengapa Dua Murid SD di Kota Mojokerto Pindah Sekolah*. <https://inilahmojokerto.com/2019/08/14/alasan-mengapa-dua-murid-sd-di-kota-mojokerto-pindah-sekolah/> Diakses pada Sabtu, 2 Januari 2021 Pukul 18:05